

## **BAB II**

### **KEBIJAKAN *ONE BELT ONE ROAD* DI DJIBOUTI**

#### **DAN *DEBT TRAP***

##### **2.1. Sejarah Jalur Sutra**

Jalur Sutra atau yang biasa disebut dengan *Silk Road* merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan China serta wilayah Timur dengan Timur Tengah dan juga Eropa. Sebelum adanya Jalur Sutra yang seperti kita ketahui sekarang, terdapat jalur perdagangan yang terletak di tempat yang sama dan telah ada pada zaman Kekaisaran Achaemenid, dimana jalur ini membentang dari Susa yang sekarang menjadi Iran hingga Laut Mediterania yang sekarang menjadi Turki (Mark, 2018). Barulah kemudian penjelajah terkenal dari Eropa yang bernama Marco Polo juga pernah menjelajahi dan mendeskripsikannya pada catatan perjalanannya akan tetapi dia tidak pernah menamai jalur ini. Baru pada tahun 1877 M, seorang ahli geografi asal negara Jerman yang bernama Ferdinand Von Richtofen menamai jalur ini sebagai "*Seidenstrasse*" atau "*Seidenstrassen*" yang berarti Jalur Sutra atau *Silk Route*. Barang yang menjadi komoditas dagang pada rute tersebut berbeda tergantung arah kedatangan barang. Untuk barang yang datang dari Barat antara lain adalah kuda, anjing dan hewan asli daerah Barat, bulu dan kulit hewan, madu, buah, barang yang terbuat dari kaca, selimut dan karpet wol, barang tekstil, emas dan perak, unta, budak, serta persenjataan. Sedangkan barang dari arah Timur untuk daerah Barat antara lain adalah sutra, teh

pewarna, batu berharga, perabotan asal China (piring, mangkok, cangkir, vas), rempah-rempah, perunggu, obat-obatan, parfum, gading, beras, kertas, dan juga bubuk mesiu, dimana sutra merupakan barang yang sangat diminati dan kemudian menjadikan barang tersebut sebagai nama jalur ini (Mark, 2018).

Jalur Sutra menjadi sebuah “*tren*” pada masa itu dikarenakan seorang penjelajah sekaligus pedagang asal Venesia yang bernama Marco Polo. Marco Polo dilahirkan di Venesia, Italia pada tahun 1254 dan mempunyai ayah yang bernama Niccolo Polo dan ibu yang bernama Anna Defuseh. Nama keluarga Polo dimulai pada tahun 1260 dimana ayah dari Marco Polo yaitu Niccolo Polo dan saudara ayahnya yang bernama Maffeo Polo melakukan perjalanan ke Konstantinopel dan dari situ mereka memulai perjalanan perdagangan ke arah Krimea. Dari situ, nasib membawa mereka ke arah Utara sepanjang sungai Volga yang berada di Barat negara Rusia, dan kemudian ke arah Timur ke Bokhara yang berada di negara Uzbekistan, dimana di kota itu mereka bertemu dengan duta besar Kublai Khan yang kemudian Niccolo dan Maffeo Polo diundang ke kastil milik Kublai Khan. Disitu mereka diminta untuk menceritakan tentang kampung halaman mereka yaitu Venesia dan meminta mereka untuk menjelaskan tentang agama Kristen dan kemudian memutuskan untuk menjadikan mereka sebagai duta besar dari mutuskan untuk menjadikan mereka sebagai duta besar dari kerajaan Tatar dan mengirim mereka kembali ke Eropa untuk bertemu dengan Paus untuk mengirimkan salam damai dan mengirim permintaan 100 misionaris untuk menyebarkan agama Kristen di China pada saat itu. Niccolo dan Maffeo Polo pada akhirnya kembali di Italia pada tahun 1269. Akan tetapi orang yang

seharusnya mereka temui yaitu Paus Clement IV telah meninggal selama satu tahun dan masih belum terpilih penggantinya. Selain itu, Niccolo Polo juga mengetahui bahwa istrinya juga telah meninggal. Selama 2 tahun mereka menetap di Venesia, Paus baru belum juga terpilih dan mereka memutuskan untuk kembali ke Kubilai Khan untuk melaporkan tentang kegagalan mereka. Selain itu, mereka juga tergiur dengan keuntungan dagang yang akan mereka dapatkan dan di perjalanan ini, mereka akhirnya memutuskan untuk mengajak Marco Polo, dan pada waktu itulah kisah dari Marco Polo di Jalur Sutra dimulai (Komroff & Polo, 2002), dan juga pada akhirnya Jalur Sutra dikenal oleh dunia berkat catatan perjalanan Marco Polo yang sekarang menjadi buku yang berjudul *The Travels of Marco Polo*.

### **2.1.2 Tributary System**

*Tributary System* merupakan sistem yang beredar pada masa dinasti Tang dimana penguasa China menganggap bahwa utusan asing membawa upeti sebagai tanda kesesuaian dengan tatanan dunia yang dibuat oleh China. Dalam prakteknya, *Tributary System* ini diterapkan dengan cara nega-negara tetangga memberika upeti kepada China sebagai jaminan untuk perdamaian, kedudukan, serta kesempatan untuk berdagang (Chu, 1994). Sistem ini berlangsung dengan 4 cara yaitu:

- a) Negara *tributary* mengirimkan utusan ke Kekaisaran China.
- b) Utusan negara *trubutary* “bersujud” didepan Kaisar China.

- c) Utusan negara *tributary* mempresentasikan negara mereka dan mendapat “hadiah” yang merupakan sebuah simbol pengakuan sebagai negara *tributary*.
- d) Pengakuan negara *tributary* sebagai negara dibawah Kekaisaran China.

Negara-negara yang pernah mengirimkan utusannya ke China (*tributary country*) adalah sebagai berikut :

**a) Korea**

Konfederasi Jin dan Mahan tercatat membayar upeti kepada dinasti Jin pada tahun 280 Masehi dan sejarah ini tercatat didalam *Book of Jin* dimana buku ini merupakan buku yang berisi tentang sejarah dinasti Jin pada tahun 266 sampai dengan tahun 420. Pada saat daerah Korea masih menjadi teritori kekaisaran China lebih tepatnya dinasti Han, daerah tersebut disebut dengan kekaisaran Goguryeo. Pada masa itu, Goguryeo merupakan negara yang didirikan di distrik administratif Xuantu yang merupakan bagian dari dinasti Han. Distrik administratif tersebut kemudian menguasai 4 distrik administratif lainnya dan akhirnya mengembangkan kekuasaannya sampai dengan semenanjung Korea. Sejarah dari 3 Kerajaan menyebutkan bahwa Goguryeo mengirimkan utusan ke dinasti Han dengan membawa upeti yang ditujukan untuk Kaisar Guangwu sebagai tanda pengakuan mereka sebagai distrik administratif pada tahun 30 masehi.

### **b) Jepang**

Pada tahun 1404 masehi, Shogun Ashikaga Yoshimitsu yang merupakan Shogun ketiga dari keshogunan Ashikaga mendapatkan dan dinobatkan sebagai “Raja dari Jepang” dari kekaisaran Jepang oleh kekaisaran China. Pada masa itu Jepang sudah memiliki kaisar sebagai penguasa, akan tetapi disini kaisar hanya sebagai “simbol” penguasa dari Jepang itu sendiri, sedangkan penguasa secara *de facto* dipegang oleh Shogun yang merupakan “panglima perang” dari daerah-daerah yang dikuasainya. Setelah kematian Shogun Ashikaga Yoshimitsu pada tahun 1408, Jepang masih menjadi *tributary country* untuk sementara. Hubungan dengan kekaisaran China ini berakhir pada tahun 1549 ketika Jepang memutuskan untuk berhenti sebagai *tributary country* dan memutuskan segala pengiriman utusan ke Kekaisaran China. Dalam sejarah, hanya Shogun Ashikaga Yoshimitsu yang pernah menerima gelar dari kekaisaran China.

### **c) Thailand**

Thailand merupakan salah satu *tributary country* dari kekaisaran China mulai dari masa dinasti Sui sampai dengan Pemberontakan Taiping di tengah abad ke 19. Pemberontakan serta perang sipil ini terjadi di China pada tahun 1850 sampai dengan 1864 dimana dinasti Qing yang dipimpin oleh etnis Manchu melawan *Taiping Heavenly Kingdom* yang dipimpin oleh etnis Hakka. *Taiping Heavenly Kingdom* ini merupakan sebuah kerajaan tidak sah yang didirikan oleh Hong Xiuquan yang mengaku sebagai saudara dari Yesus Kristus. Kerajaan yang tidak sah ini memiliki tujuan yang berdasarkan religius, nasionalis, dan politik.

Kerajaan Sukhotai yang merupakan kerajaan pertama yang menyatukan Thailand menjalin hubungan *tributary* dengan dinasti Yuan di masa pemerintahan raja Ram Khamhaeng dan Thailand menjadi *tributary country* sampai dengan tahun 1853.

#### **d) Vietnam**

Vietnam menjadi daerah kekuasaan kekaisaran China selama 1050 tahun, dan ketika Vietnam mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 938, Vietnam menjadi *tributary country* dari kekaisaran China sampai dengan tahun 1885 dan berakhir dengan perjanjian Hue atau perjanjian protektorat yang menjadikan Vietnam sebagai negara protektorat dari Prancis. Dinasti Le yang berkuasa pada tahun 1428 sampai dengan 1527 dan dinasti Nguyen yang berkuasa pada tahun 1802 sampai dengan 1945 merupakan kerajaan di Vietnam yang menerapkan sistem kekaisaran China yang berdasar konfusianisme dan berupaya untuk mendirikan *tributary system* mereka sendiri.

#### **e) Malaysia**

Negara Malaysia juga pernah menjadi salah satu *tributary country* dari kekaisaran China, diantaranya adalah Kerajaan Tanah Merah, Kerajaan Kedah, Kelantan, dan juga Kesultanan Malaka. Kerajaan Tanah Merah pada dahulu kala disebut dengan *Chi Tu* menurut sejarah dinasti Sui, merupakan kerajaan yang terdapat di negara Malaysia pada tahun 607. Kerajaan ini tercatat mengirimkan sejumlah *tributary mission* kepada Kekaisaran China.

### **2.1.3 Relevansi *Tributary System* dengan *Debt Trap***

*Tributary System* ini dirasa oleh peneliti sangat berkaitan dengan *Debt Trap* yang terjadi di masa ini dikarenakan *Tributary System* ini sendiri merupakan salah satu upaya China untuk berhubungan dengan negara lain dengan menempatkan China sebagai pusatnya serta menjadikan negara-negara lainnya sebagai negara persemakmurnya. Sedangkan dalam *Debt Trap* yang menjadi efek samping dari proyek BRI China ini, negara-negara yang dilewati oleh China dan diberikan bantuan dana juga akan menjadikan negara China sebagai pusat dari bantuan tersebut.

## **2.2 Restrukturisasi Jalur Sutra**

Ahli kajian strategis dan global UI Moch Faisal dalam webinarnya pada tahun 2021 yang dikutip oleh detik.com menyebutkan bahwa jalur sutra yang ada saat ini dikenal dengan nama Jalur Sutra Baru, merupakan jalur perdagangan sekaligus titik persilangan perdagangan antar berbagai negara di dunia yang mencakup aspek daratan (*New Silk Road Economic Belt*) dan lautan (*Century Maritime Silk Road*). Ditambahkan bahwa China saat ini telah membentuk jalur sutra baru dengan menggandeng negara-negara Asia dan Afrika melalui mekanisme kerjasama infrastruktur. Upaya ini dapat dilakukan China karena memiliki basis manufaktur yang kuat dan volume produksi yang besar.

China merupakan negara yang pada saat ini menjadi kekuatan dunia yang mampu menantang hegemoni Amerika Serikat. Kemajuan yang dialami China dalam berbagai bidang, khususnya ekonomi menjadikan China sebagai salah satu

kekuatan global. China berusaha menunjukkan eksistensinya pada dunia yang tercermin dalam kebijakan luar negerinya. Salah satu kebijakan luar negeri China adalah *One Belt One Road* (OBOR) atau sekarang sering disebut dengan *Belt and Road Initiative* (BRI).

### **2.2.1 Deklarasi OBOR**

Rute perdagangan Jalur Sutra yang telah ada sejak zaman dahulu, menjadi perbincangan dengan adanya rencana untuk dibuka kembali rute tersebut oleh pemerintahan Jiang Zemin pada tahun 2001. Jalur Sutra baru dibahas dalam suatu forum internasional *Asia-Europe Meeting* (ASEM), yang dijelaskan bahwa tujuan dari realisasi Jalur Sutra baru ini untuk menjalin hubungan dan mempererat kerja sama perdagangan dengan negara-negara di sejumlah kawasan dunia. Selain itu, kerja sama ini juga akan meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat dalam Jalur Sutra baru tersebut. Pidato yang diungkapkan oleh Jiang Zemin, menyatakan bahwa: “*ASEM Should build a new Silk Road to actively boost exchanges between these two civilizations in the new century so that countries in Asia and Europe will build on their respective civilization and respect, learn from, complement and benefit each other.*”

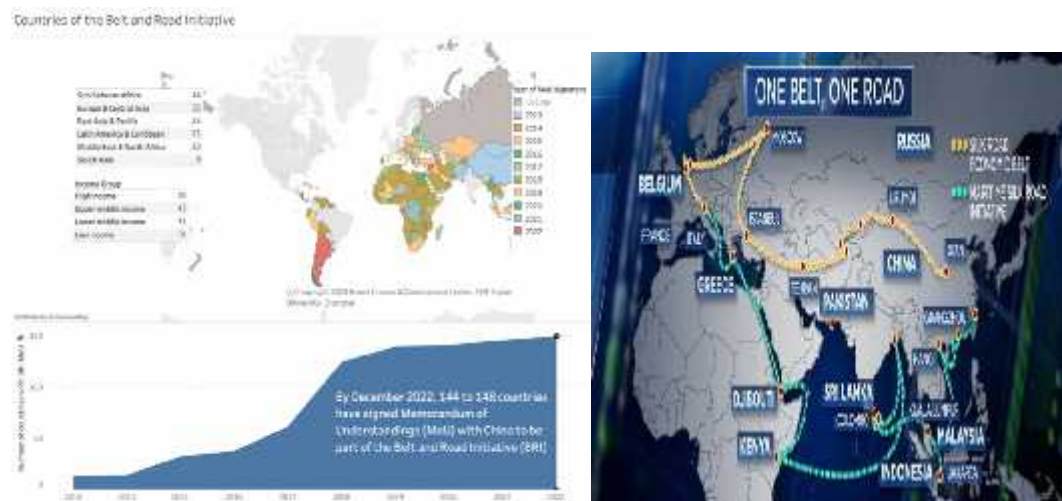
Pembangunan Jalur Sutra Baru ini memiliki tujuan sebagai salah satu strategi keamanan energi China, yang pada masa pemerintahan Jiang Zemin mengalami peningkatan ekonomi secara tidak langsung juga selaras dengan peningkatan energi oleh China, sehingga China ingin memaksimalkan peluang yang ada dan mempertahankan perekonomian dengan memaksimalkan kerjasama



dikawasan Asia Tengah, pada kawasan tersebut memiliki banyak sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Merujuk dari hal tersebut, China memulai strategi dengan melakukan suatu pendekatan pada aspek politik terhadap negara di kawasan Asia Tengah tersebut, yang dimana pada masa Dinasti Han terdapat persamaan sejarah terhadap jalur sutra yang diterapkan pada nilai-nilai kultural sebagai dasar dari strategi yang dilakukan oleh China.

Kemudian pada tahun 2013, Xi Jinping selaku presiden China mengumumkan *One Belt One Road Initiative* dengan cara berpidato secara resmi di Kazakhstan dan juga Indonesia. *One Belt One Road (OBOR) Initiative* ini bertujuan untuk mengisi ruang kosong antara kepentingan ekonomi dan perdagangan, serta kalkulasi politik dan keamanan. Dalam pidatonya di Kazakhstan, presiden Xi Jinping mengatakan bahwa *initiative* ini memiliki tujuan utama sebagai menghubungkan China menggunakan jalur darat ke Eropa, sedangkan dalam pidato Presiden Xi Jinping di Indonesia mengatakan bahwa *initiative* yang juga disebut dengan “Jalur Sutra Maritim Abad ke-21” ini bertujuan untuk menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa melalui jalur laut. Dalam perspektif pemerintah China, *initiative* ini akan menghubungkan China, Asia Tengah, Rusia, serta Eropa khususnya area Baltik. Presiden Xi Jinping memiliki ambisi untuk menjadikan China sebagai aktor dominan dalam perdagangan di kancah Internasional. Program *Belt and Road Initiative (BRI)* ini menargetkan kawasan Asia, Afrika dan Eropa. Kebijakan ini bertujuan untuk membangun infrastruktur guna meningkatkan konektivitas di antara negara-negara, meningkatkan arus perdagangan dan investasi, dan pinjaman dana.

Inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) mempunyai jaringan yang sangat luas, yakni hampir  $\frac{2}{3}$  populasi global dan  $\frac{3}{4}$  sumber energi di dunia. Dapat dilihat dari inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) ini China membangun strategi bagaimana untuk mendapat tempat secara global. Inisiatif *Belt and Road Initiative* (BRI) sendiri digambarkan untuk merancang kembali tatanan politik dan ekonomi di Asia dengan beberapa jaringan perusahaan, budaya, politik, dan perdagangan dikembangkan. Banyak peneliti berpikir bahwa *Belt and Road Initiative* (BRI) merupakan inisiatif China untuk menciptakan pasar global yang lancar bagi negara tersebut. Salah satu cara untuk menciptakan pasar global yang lancar bagi China adalah dengan diberlakukannya *Debt-book Diplomacy* pada negara-negara yang membutuhkan aliran dana dari China untuk membangun negara mereka (Sheu & Kundu, 2017).



**Gambar 2.1** Negara yang Dilewati OBOR

**Sumber:** Countries of the Belt and Road Initiative (BRI) – Green Finance & Development Center (greenfdc.org)

### 2.3 Awal Hubungan China-Djibouti

Terletak pada ujung benua Afrika tepatnya pada ujung tanduk Afrika, perekonomian Djibouti sangat bergantung kepada pelabuhan canggihnya, dimana pelabuhan ini dapat dikatakan merupakan salah satu pelabuhan yang terancang di dunia. Menurut situs *World Bank*, perdagangan negara Djibouti diharapkan dapat bertumbuh dengan lebih cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara tetangganya yaitu Somalia. Negara Djibouti memiliki aset alami yang berupa aset akuatik yang dapat dipergunakan sebagai sektor pariwisata seperti Pulau Moucha yang merupakan rumah dari berbagai fauna seperti burung pelikan, luwak, serta fauna akuatik seperti kepiting dan bulu babi (Djibouti, t.thn.), serta sumber daya laut yang masih belum terjamah yang dapat mendukung industri perikanan tradisional, dan juga infrastruktur kabel bawah laut yang dapat digunakan untuk pengembangan industri digital (World Bank, 2022)

Sedangkan China sebagai salah satu negara tertua dan *superpower* di dunia, negara tersebut seperti memiliki suatu kuasa terhadap negara-negara lainnya, dimana dengan kuasa ini China memprakarsai rencananya yang dapat dikatakan ambisius yang bernama OBOR. Sebagai salah satu *superpower* di dunia, pertumbuhan tinggi ekonomi China berdasarkan investasi, manufaktur berbiaya rendah, dan ekspor sebagian besar telah mencapai batasnya dan telah menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Mengurangi ketidakseimbangan ini memerlukan pergeseran struktur ekonomi dari manufaktur ke jasa bernilai tinggi, dari investasi ke konsumsi, dan dari intensitas karbon tinggi ke rendah.

Selama beberapa tahun terakhir, pertumbuhan telah melambat dalam menghadapi kendala struktural, termasuk penurunan pertumbuhan angkatan kerja, hasil investasi yang menurun, dan pertumbuhan produktivitas yang melambat. Tantangan ke depan adalah menemukan pendorong pertumbuhan baru sambil mengatasi warisan sosial dan lingkungan dari jalur pembangunan China sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi China yang pesat melebihi laju pembangunan kelembagaan, dan terdapat kesenjangan kelembagaan dan reformasi penting yang perlu diatasi China untuk memastikan jalur pertumbuhan yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Peran negara perlu berkembang dan fokus pada penyediaan lingkungan bisnis yang jelas, adil dan stabil, penguatan sistem regulasi dan supremasi hukum untuk lebih mendukung sistem pasar, serta memastikan pemerataan akses pelayanan publik kepada seluruh warga negara.

Mengingat ukurannya, China menjadi pusat dari banyak permasalahan pembangunan dalam skala regional dan global. Meskipun bukan sumber utama emisi kumulatif historis, pada tahun 2019 China menyumbang 27 persen karbon dioksida global tahunan dan sepertiga dari emisi gas rumah kaca dunia – dengan emisi per kapita kini melampaui emisi Uni Eropa, meskipun sedikit di bawah rata-rata OECD dan jauh di bawah tingkat Amerika Serikat – dan polusi udara dan airnya mempengaruhi negara lain. Masalah lingkungan global tidak dapat diselesaikan tanpa keterlibatan China.

Pertumbuhan ekonomi China juga merupakan sumber penting permintaan global. Penyeimbangan kembali ekonominya akan menciptakan peluang baru bagi eksportir manufaktur, meskipun dapat mengurangi permintaan komoditas dalam jangka menengah. China merupakan pengaruh yang tumbuh pada ekonomi berkembang lainnya melalui perdagangan, investasi, dan gagasan. Banyak dari tantangan pembangunan kompleks yang dihadapi China relevan dengan negara lain, termasuk transisi ke model pertumbuhan baru, penuaan yang cepat, membangun sistem kesehatan yang hemat biaya, dan mempromosikan jalur energi rendah karbon.

Menyusul pembukaan kembali China yang cepat setelah wabah COVID-19 pada akhir tahun 2022, pertumbuhan PDB diperkirakan akan pulih menjadi 5,1 persen pada tahun 2023, dari 3 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan akan dipimpin oleh pemulihan permintaan, terutama untuk jasa. Investasi diperkirakan akan tetap kuat, didukung oleh pertumbuhan investasi infrastruktur dan manufaktur yang lebih lambat namun berkelanjutan, serta stabilisasi investasi properti secara bertahap. Ekspor neto diperkirakan akan membebani pertumbuhan, karena melemahnya permintaan eksternal ditambah dengan sedikit percepatan pertumbuhan impor yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik (World Bank, 2023)

### **2.3.1 Pembangunan Jalur Sutra China di Djibouti**

Pada tahun 2018, China menyatakan bahwa Djibouti merupakan bagian dari *Belt and Road Initiative* mereka. Alasannya adalah karena Djibouti memiliki

sejarah hutang yang panjang dengan China dimana pada tahun 2022 hutang Djibouti terhadap China mencapai angka 89.5%.

Djibouti 2022	
Official bilateral	Total Debt Service
China	89,5%
Kuwait	6,1%
Italy	3,6%
India	3,1%
Saudi Arabia	2,5%
Turkey	1,5%
France	0,6%
United Arab Emirates	0,5%
Spain	0,3%
Belgium	0,1%
Total	100,0%

**Tabel 2.1 Tabel Hutang Djibouti tahun 2022**

**Sumber:** [chinaglobalsouth.com/2022/12/01/djibouti-has-a-very-specific-debt-problem/](http://chinaglobalsouth.com/2022/12/01/djibouti-has-a-very-specific-debt-problem/)

Selain itu, dikabarkan juga bahwa China telah memberikan sebanyak 1.5 miliar dollar kepada Djibouti sejak tahun 2000 untuk pembangunan infrastruktur di negara tersebut. Selain itu, China juga telah memberikan bantuan sebanyak 420 juta dollar untuk proyek yang berkaitan dengan dermaga dan infrastruktur yang bersangkutan termasuk juga sebuah proyek rel kereta dan 2 proyek bandara, dan juga bantuan sebanyak 320 juta dollar untuk pembangunan pipa untuk mengalirkan air dari negara tetangga yaitu Ethiopia.

Atas alasan keamanan dari ekonomi dunia dan keamanan proyek BRI mereka, China mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya yang terletak

di Doraleh, Djibouti pada tahun 2017 lalu. Selain untuk memenuhi kebutuhan keamanan dari *Belt Road Initiative* mereka sendiri, pangkalan ini juga didirikan untuk “menyaingi” kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat yang terletak di berbagai negara. Selain proyek-proyek yang sudah disebutkan diatas tadi, perusahaan telekomunikasi China yaitu Huawei juga membangun kabel fiber optik bawah laut yang berjarak 7500 mil yang menghubungkan Djibouti-Pakistan dengan kabel Asia-Afrika-Eropa tersebut (Huawei, 2017).



**Gambar 2.2 Lokasi Pangkalan Militer China dan Amerika di Djibouti**

**Sumber:** US, Chinese Troops Coexist and Cooperate in Djibouti, General Says (businessinsider.com)

### 2.3.2 *Debt-book Diplomacy*

*Debt-book Diplomacy* merupakan ungkapan yang pertama kali dikemukakan oleh Sam Parker & Gabrielle Chefitz pada tahun 2018, ungkapan itu berisi tentang deskripsi *One Belt One Road* (OBOR) atau juga disebut sebagai *Belt and Road Initiative* (BRI) yang merupakan insiatif politik China di kancah Internasional. *Debt-book Diplomacy* yang dilakukan China merupakan peristiwa

dan statistik terkini dari tindakan ekonomi politik China berskala global menurut analisa Parker dan Chefitz. Diplomasi ini memiliki inti yaitu dengan menawarkan beberapa pinjaman kepada negara-negara yang bersangkutan yang digunakan untuk membangun jalan, infrastruktur dan mempercepat pembangunan ekonomi pada daerah-daerah yang berkembang (Parker & Chefitz, 2018).

*Debt-book Diplomacy* oleh China akan berakibat terjadi *Debt trap*. *Debt trap* ini berkaitan dengan adanya pola kegiatan politik China pada tingkat Internasional, pada saat semakin maraknya investasi yang dilakukan oleh China di kawasan Afrika. Akan tetapi setelah *initiative* ini dimulai, selain menuai hal positif dalam segi ekonomi maupun relasi, terdapat juga hal negatif yang berdampak kepada negara-negara yang dilaluinya yang berupa hutang yang banyak diberikan kepada negara-negara yang dilaluinya, dimana beberapa negara yang diberikan oleh China tersebut tidak dapat membayar kembali hutang mereka. Hutang yang diberikan oleh China ini melibatkan cukup banyak negara dimana dalam penelitian ini akan berfokus membahas *Debt Trap* yang terjadi di negara Djibouti.